



**WALIKOTA PRABUMULIH**

**PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH  
NOMOR 6 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PRABUMULIH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2012 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
26. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH**

**dan**

**WALIKOTA PRABUMULIH**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015**

**Pasal 1**

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan Arus Kas;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

## Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2015 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp 816.654.321.922,87	
b. Belanja	<u>Rp 930.835.291.525,46</u>	
Surplus/(Defisit)		Rp (114.180.969.602,59)
c. Pembiayaan :		
- Penerimaan	Rp 152.242.418.117,85	
- Pengeluaran	<u>Rp 36.513.122.439,96</u>	
Surplus/(defisit)		Rp 115.729.295.677,89

## Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp 78.835.328.977,13 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp 895.489.650.900,00
b. Realisasi	<u>Rp 816.654.321.922,87</u>
Selisih (kurang)	Rp (78.835.328.977,13)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 89.203.959.559,39 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp 1.020.039.251.084,85
b. Realisasi	<u>Rp 930.835.291.525,46</u>
Selisih (kurang)	Rp (89.203.959.559,39)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp 10.368.630.582,26 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (124.549.600.184,85)
b. Realisasi Surplus/(defisit)	<u>Rp (114.180.969.602,59)</u>
Selisih Lebih	Rp 10.368.630.582,26

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 13.169.038.040,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 165.411.456.157,85
b. Realisasi	<u>Rp 152.242.418.117,85</u>
Selisih (kurang)	Rp (13.169.038.040,00)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 4.348.733.533,04 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 40.861.855.973,00
b. Realisasi	<u>Rp 36.513.122.439,96</u>
Selisih (kurang)	Rp (4.348.733.533,04)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 8.820.304.506,96 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp	124.549.600.184,85
b. Realisasi	Rp	115.729.295.677,89
Selisih (kurang)	Rp	(8.820.304.506,96)

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp	2.440.907.402.219,35
b. Jumlah kewajiban	Rp	66.868.914.586,25
c. Jumlah ekuitas dana	Rp	2.374.038.487.633,10

#### Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2015	Rp	78.162.784.927,85
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	185.191.688.000,41
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(334.184.545.603,00)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	72.378.398.750,04
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	40.888.025,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2015	Rp	1.589.214.100,30

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.424.653.649.861,20
b. Beban	Rp	852.825.141.274,36
c. Surplus Operasional	Rp	571.828.508.586,84
d. Surplus/(Defisit) Non Operasional	Rp	0,00
e. Beban Luar Biasa	Rp	223.622.000,00
f. Surplus/(Defisit) - LO	Rp	571.604.886.586,84

#### Pasal 7

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	Rp	78.162.784.927,85
b. Penggunaan SAL	Rp	78.162.784.927,85
c. SILPA	Rp	1.548.326.075,30
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp	0,00
e. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir	Rp	1.548.326.075,30

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015 sebagai berikut :

a.	Ekuitas Awal	Rp	1.801.577.895.795,53
b.	Surplus/(Defisit) - LO	Rp	571.604.886.586,84
c.	Dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/ koreksi kesalahan	Rp	855.705.250,73
d.	Ekuitas Akhir	Rp	2.374.038.487.633,10

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- |    |               |   |  |
|----|---------------|---|--|
| a. | Lampiran I    | : | Laporan Realisasi Anggaran   |
|    | Lampiran I.1  | : | Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;  |
|    | Lampiran I.2  | : | Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;   |
|    | Lampiran I.3  | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;   |
|    | Lampiran I.4  | : | Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; |
|    | Lampiran I.5  | : | Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan;  |
|    | Lampiran I.6  | : | Daftar piutang daerah  |
|    | Lampiran I.7  | : | Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;  |
|    | Lampiran I.8  | : | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;   |
|    | Lampiran I.9  | : | Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;  |
|    | Lampiran I.10 | : | Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;                                       |
|    | Lampiran I.11 | : | Daftar dana cadangan daerah; dan   |
|    | Lampiran I.12 | : | Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.  |
| b. | Lampiran II   | : | Neraca   |
| c. | Lampiran III  | : | Laporan Arus Kas   |
| d. | Lampiran IV   | : | Laporan Operasional  |
| e. | Lampiran V    | : | Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih   |
| f. | Lampiran VI   | : | Laporan Perubahan Ekuitas  |
| g. | Lampiran VII  | : | Catatan atas Laporan Keuangan  |

#### Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) berupa laporan keuangan perusahaan daerah air minum Tirta Prabujaya dan perusahaan daerah Petro Prabu tercantum dalam lampiran VIII peraturan daerah ini.

Pasal 12

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 30 Agustus 2016



Diundangkan di Prabumulih  
pada tanggal 30 Agustus 2016



LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH  
TAHUN 2016 NOMOR 7